

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbicara tentang nilai kemanusiaan berarti berbicara tentang beberapa aspek yang memiliki pengertian yang saling berkaitan, di antaranya mengenai humanisme, etika, kebudayaan dan perilaku. Humanisme sendiri adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan atau mencita-citakan pergaulan yang lebih baik. Ada juga yang berpendapat humanisme sebagai sikap atau tingkah laku mengenai perhatian manusia dengan menekankan pada rasa belas kasih serta martabat individu.

Pengertian etika yang dipahami lebih luas di kalangan medis selama ini selalu menjadi jargon seorang tenaga kesehatan. Etika dalam keperawatan merupakan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku profesional yang tepat berkaitan dengan hak dirinya sebagai tenaga medis, hak pasiennya, hak teman sejawatnya maupun hak orang lain. Bila dikaitkan dengan kebudayaan, perawat adalah suatu profesi yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai lawan interaksinya dalam konteks makhluk yang sama berbudaya. Karena itu seorang perawat harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Untuk membangun nilai-nilai sosial itu agar tetap menjadi landasan bagi setiap perawat dalam menjalani kehidupan profesinya yang luas, maka disinilah pengetahuan kebudayaan menjadi konsep dasar dalam membangun jati diri sebagai petugas layanan kesehatan.

Nilai-nilai kemanusiaan ini diharapkan bisa diterapkan dalam praktek keperawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan keperawatan, bisa memberi pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun penyalahgunaan ilmu-ilmu keperawatan untuk hal-hal yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang diatur dalam PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Bahkan dalam

Fusnika, 2014

Pembinaan Civic Disposition berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga perawat merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung

dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Namun di dalam menjalankan tugasnya tak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Bahkan profesi perawat sangat rentan dengan kasus hukum seperti gugatan malpraktik sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya dalam pelayanan kesehatan. Terlebih lagi bahwa perawat bukan lagi sekedar tenaga kesehatan yang pasif. Dalam keperawatan, humanisme merupakan suatu sikap dan pendekatan yang memperlakukan pasien sebagai manusia, menurut Dwidiyanti (2008 : 5), bahwa:

Perawat mempunyai kebutuhan lebih dari sekedar nomor tempat tidur atau sebagai seorang berpenyakit tertentu. Perawat yang menggunakan pendekatan humanistik dalam prakteknya memperhitungkan semua yang diketahuinya tentang pasien yang meliputi pikiran, perasaan, nilai-nilai, pengalaman, kesukaan, dan bahasa tubuh.

Adapun data media massa berikut menunjukkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tenaga medis:

Tabel 1.1
Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Indonesia

No	Nama Kasus	Sumber Informasi
1	Pembuangan pasien seorang kakek hingga meninggal yang dilakukan salah satu rumah sakit di Bandar Lampung yang cukup menyedot perhatian berbagai pihak. Akibat dari kejadian ini enam orang pegawai rumah sakit tersebut dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Bandar Lampung. Keenam orang yang diduga melakukan tindakan keji itu antara lain adalah Andi dan Andika (cleaning service), Rika (perawat), Rudi (juru parkir), Muhaimin (sopir), dan Adi (office boy).	Liputan 6.com, Kamis 13 Februari 2014
2	Kasus Dera Nur Anggraini bayi malang yang menghembuskan nafasnya pada usia 7 hari. Bayi Dera meninggal akibat penyakit gangguan saluran pernapasan, ironisnya bayi Dera ditolak oleh 10 rumah sakit yang didatangi oleh ayah dan kakeknya. Alasan rumah sakit yang didatangi adalah rumah sakit penuh bahkan ada rumah sakit meminta uang muka terlebih dahulu.	kompas Sabtu 16 Februari 2013
3	Zahrah, bayi yang berasal dari keluarga miskin di	Tribun Timur

	Kabupaten Bulukumba, pun diminta untuk melengkapi berkasnya terlebih dahulu di Dinas Sosial Bulukumba.	27 April 2013 halaman 17
4	Kasus yang menimpa Suharni dan Santi berikut dua bayi mereka. Keempatnya masih tertahan - 4 bulan dan 2 minggu -di RS Bersalin Sofa Marwa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, karena tak mampu membayar biaya persalinan. Mereka tak sanggup membayar biaya operasi <i>caesar</i> masing-masing Rp 5 juta. Selama dalam “penyanderaan”, mereka juga diwajibkan membayar biaya Rp 100.000 per hari.	Kompas, 20 Februari 2010
5	Kasus Gatot dan istrinya. Bayi mereka disandera oleh Rumah Sakit Surabaya Medical Service (SMS) karena tak mampu membayar biaya operasi melahirkan isterinya. Pihak Rumah Sakit juga memberikan surat pernyataan, jika Gatot menyatakan mau menitipkan bayi ke rumah sakit selama paling lama 2 hari. Bila selama 2 hari tidak datang untuk mengambil bayi dan melunasi biaya, akan diserahkan ke pihak III (polisi).	Kompas, 20 Februari 2010
6	Yang paling mengejutkan adalah kasus yang menimpa pasangan Nurul Istiqomah (25) dan Abdul Karim (40) warga Kab. Probolinggo. Bayi perempuannya yang berusia 3 hari meninggal di RSUD Waluyo Jati. Ironisnya jenazah bayi tersebut tidak boleh dibawa pulang sebelum membayar biaya perawatan.	Kompas, 20 Februari 2010

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2014

Bukti tersebut menggambarkan bahwa semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan di dunia medis. Kasus-kasus diatas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pihak penyedia layanan kesehatan menyadari betul apa arti pelayanan kesehatan. Pasal 28 H (1) UUD 1945 amandemen 2002 jelas menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Ini diperkuat dengan Pasal 2 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, “kesehatan adalah hak asasi manusia, dan seperti yang kita ketahui, hak asasi itu harus ditunaikan, tidak peduli seseorang kaya atau miskin pejabat atau rakyat biasa, semua warga negara berhak sehat”. Adapun tabel di bawah ini menggambarkan proporsi pasien di rumah sakit Syamsudin Kota Sukabumi.

Tabel.1.2
Proporsi pengunjung pada Rumah Sakit Syamsudin Kota Sukabumi

Kelas	Jumlah
NULL	0
INTENSIVE	1002
IW	2510
KELAS 1A AC	22
KELAS 1A NON AC	1114
KELAS 1B	1876
KELAS 1C	2631
KELAS II	9783
KELAS III	14277
KELAS UTAMA I	24277
KELAS UTAMA II	2078

Sumber: Administrasi Rumah Sakit Syamsudin Kota Sukabumi tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa banyak pasien yang menempatkan ruangan kelas III yang selalu identik dengan orang miskin. tentunya dengan kelas seperti itu tidak maksimalnya pelayanan kesehatan, setiap pasien yang datang berobat berhak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Tidak adil rasanya jika kualitas pelayanan yang diberikan tidak sama antara pasien dengan kantong tebal dibandingkan pasien dengan jamkesmas. Pasien dengan jamkesmas sering kurang mendapat perhatian dari pihak rumah sakit. Mereka hanya bisa diam dan pasrah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, karena itu masyarakat dan tenaga

kesehatan perlu diingatkan kembali akan hak dan kewajiban pasien dengan jaminan sosial.

Mahasiswa keperawatan sebagai bagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik ketika menjadi tenaga medis nantinya. Pembinaan mahasiswa perawat generasi muda Indonesia agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) dengan terwujudnya keberlangsungan kehidupan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, Sanusi (1998:267) menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan proses mendidik atau pembelajaran peserta didik yang diasumsikan mempunyai beberapa fungsi seperti antara lain mampu menumbuhkan dan mentransformasikan nilai-nilai positif sambil memberdayakan serta mengembangkan potensi-potensi kepribadian peserta didik.

Berdasarkan pandangan diatas, jelaslah bahwa pendidikan keperawatan sebagai suatu profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengembangannya harus mampu mandiri. Untuk itu memerlukan suatu wadah yang mempunyai fungsi utama untuk menetapkan, mengatur serta mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan profesi seperti pengaturan hak dan batas kewenangan, standar praktek, standar pendidikan, kode etik profesi dan peraturan lain yang berkaitan dengan profesi keperawatan. Perawat dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya sangat dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik yang dapat menunjang tindak prilaku profesionalnya. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik akan dapat diperoleh dalam lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk mencetak perawat yang profesional.

Dekade ini begitu banyak Perguruan Tinggi keperawatan yang berdiri dengan mekanisme yang ada. Perguruan tinggi ini tentunya memiliki andil dalam pembangunan bangsa utamanya dunia keperawatan untuk mencetak sumber daya keperawatan yang profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Zaidin,A (2001:14):

Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah terbentuk (1984) mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Tuntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka perawat masih harus memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme sesuai dengan keadaan dan lingkungan sosial di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah. Organisasi profesi dalam menentukan standarisasi kompetensi dan melakukan pembinaan, lembaga pendidikan dalam melahirkan perawat-perawat yang memiliki kualitas yang diharapkan serta pemerintah sebagai fasilitator dan memiliki peran-peran strategis lainnya dalam mewujudkan perubahan ini. Menurut Zaidin, A (2001:103) Profesi memiliki beberapa karakteristik utama sebagai salah satu tantangan terberat adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga keperawatan yang walaupun secara kuantitas merupakan jumlah tenaga kesehatan terbanyak dan terlama kontak dengan pasien, namun secara kualitas masih jauh dari harapan masyarakat.

Kenyataan di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat atau pasien terhadap kualitas pelayanan perawat di rumah sakit. Salah satu hal yang banyak disorot adalah masalah tingkah laku perawat seperti tidak ramah, kurang senyum dan tidak segera datang bila dipanggil dalam melayani pasien. Sering di jumpai seorang perawat yang berperilaku kasar dan emosional dalam memeriksa pasien sehingga menimbulkan kesan tidak baik. Kemampuan perawat dalam menangani pasien secara cepat dan tepat tanpa memandang status sosial ekonomi pasien. Hal ini penting karena perawat terkadang terlalu prosedural sehingga pasien tidak tertangani secara baik.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sikap yang profesional dalam diri perawat. Untuk melahirkan perawat-perawat profesional diperlukan suatu sistem

pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan sebaiknya dapat melahirkan perawat-perawat profesional, yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan dalam hal emosional, spritual dan psikomotor. Oleh karena itu dalam proses pendidikan keperawatan harus memperhatikan input, proses, *output* atau *outcome* dari proses pendidikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri mahasiswa keperawatan. Adapun tabel di bawah ini menggambarkan jenis-jenis keluhan pasien yang ada di Rumah Sakit di Kota Sukabumi.

Tabel.1.3

Proporsi Jenis Keluhan Pasien di RS Syamsudin Kota Sukabumi

Jenis Keluhan	Jumlah (%)
Prosedur penerimaan pasien yang lamban	35,7
Pelayanan yang kurang ramah	25
Informasi yang tidak jelas	3.6
Pengobatan yang lamban	10,7
Lainnya	25

Sumber: Humas RS Syamsudin Kota Sukabumi tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat kurangnya keramahan tenaga medis dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Perawat merupakan orang yang paling sering berinteraksi dengan pasien yang sedang dirawat maka keramahan para perawat, menjadi salah satu sugesti bagi pasien untuk sembuh. Maka dari itu mahasiswa keperawatan tentunya menyadari bahwa menjadi seorang perawat merupakan cita-cita yang memiliki banyak manfaat khususnya bagi masyarakat. Niat tulus tersebut sangat penting karena profesi perawat merupakan profesi yang berorientasi sosial atau pelayanan. Pemahaman dalam memaknai profesi perawat menjadi salah satu kekuatan mahasiswa keperawatan untuk menjadi perawat yang profesional. Menurut Zaidin, A (2000: 57), perawat profesional memiliki sikap “keterlibatan dengan pasien, respek, empati, kesungguhan, tanggung jawab, sabar, kepercayaan dan kemandirian”. Nursalam, (2007: 84)

menyatakan salah satu ciri perawat profesional adalah “mampu bersikap atau berperilaku humanis terhadap pasien”. Pasien harus diperlakukan sebagai seorang manusia yang harus diperhatikan, dijaga dan dilayani dengan setulus hati sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Novrita dalam Widyarini, (2005: 68) bahwa “perawat yang memiliki sikap empati terhadap pasien akan memberi kontribusi signifikan dalam proses penyembuhan pasien”.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Adapun menurut (Tim Dosen UGM Yogyakarta, 2002) adalah sebagai berikut :

Pendidikan kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi dengan tujuan agar mahasiswa memiliki wawasan akan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Segala hal tersebut diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk di jenjang perguruan tinggi sebagaimana tertuang baik di dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Terakhir diperbaharui dengan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa untuk berkarakter kuat layaknya sila-sila dalam Pancasila yang mengutamakan Tuhan yang Maha Esa dalam bertindak. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh pendidikan kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya.

Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada proses bagaimana membelajarkan warga negara agar memiliki kompetensi ideal, sebagaimana menurut Bronson(1998: 114) bahwa “kompetensi ideal seorang warga negara adalah dimilikinya tiga kompetensi, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan)”. Karakter atau watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang merupakan dasar pemikiran seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang mampu menjalankan karakter-karakter yang bertanggung jawab moral, disiplin diri, sabar, lemah lembut, belas kasihan, jujur, tidak pilih kasih dan dalam menerapkan karakterpubliknya seperti sopan dalam keprofesional sebagai seorang perawat ahli medis.

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nilai dan moral tersebut memiliki kerangka sistemik pendidikan kewarganegaraan menurut Budimansyah dan Suryadi,K(2008:180) dibangun atas paradigma baru sebagai berikut:

1. Secara kulikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2. Secara teoretik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (*civic knowledge, civic dispositions, dan civic skill*) yang bersifat konfluen atau saling penetrasi dan terintegrasi konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.
3. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengembangkan kehidupan bernegara khususnya dalam kalangan generasi muda dan mahasiswa pada khususnya. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda, tentu dapat terjawab jika berhasil menggambarkan generasi muda saat ini untuk ikut mengusungkan kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk dari karakter bangsa.

Pembelajaran yang efektif untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan kejujuran, disiplin, demokratis, peduli sosial dan tanggung jawab. Dengan demikian diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada di lingkungan kerjanya nanti sebagai tenaga medis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMBINAAN *CIVIC DISPOSITION* BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KOTA SUKABUMI”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Setelah mengkaji latar belakang di atas, maka akan dilakukan identifikasi masalah dalam rangka memudahkan memahami pokok permasalahan penelitian ini. Masalah yang mendasar pada situs penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, mulai pudarnya nilai-nilai kemanusiaan dalam praktek keperawatan sekarang ini. *Kedua*, pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi harus dipersiapkan dengan baik untuk membentuk mahasiswa keperawatan menjadi tenaga medis yang memiliki karakter kewarganegaraan yang baik setelah menjadi perawat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan sivitas akademik mengenai pembinaan *civic disposition* berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi?

2. Bagaimana kesesuaian materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membina *civic disposition* mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi?
3. Bagaimana program pendukung pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan *civic disposition* yang berbasis nilai-nilai pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi?
4. Bagaimana evaluasi pembelajaran materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan *civic disposition* mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membina *civic disposition* mahasiswa, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pandangan sivitas akademik mengenai pembinaan *civic disposition* berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.
- b. Mengetahui kesesuaian materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membina *civic disposition* mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan program pendukung pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan *civic disposition* yang

berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.

- d. Mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pembelajaran materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan *civic disposition* mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mencoba mengetahui seberapa jauh pembinaancivic dispositionyang berbasis nilai-nilai kemanusiaandalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraandi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Peneliti mengharapkan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui pembinaancivic dispositionyang berbasis nilai-nilai kemanusiaanpada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi.

2. Manfaat Praktis

Keberhasilan penelitian ini diharapkan disamping memberikan manfaat teoritis juga memberikan manfaat praktis, adapun manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Terhadap Peneliti, penelitian ini sebagai wahana untuk memperkaya khasanah keilmuan peneliti;
- b. Bagi Sekolah Pasca Sarjana Prodi PKn, penelitian ini diharapkan memberi sentuhan baru kajian PKn untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kota Sukabumi;
- c. Terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran, dasar keterlibatan, serta masukan kepada dosen dalam memperluas dan meningkatkan profesionalisme

khususnya dalam upaya pengembangan materi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membina *civic disposition* mahasiswa;

- d. Bagi mahasiswa Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, penelitian ini sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter kewarganegaraan yang baik.

F. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis akan menyelesaikan struktur organisasi penulis sebagai berikut: Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian (4)Manfaat Penelitian, (5) Struktur Organisasi. Bab II membahas Kajian Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Pada bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan, (2) Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), (3) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),(4)Pendekatan dan ruang Lingkup Mata Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (5) Watak Kewaragnegaran (*civic Disposition*) pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (6) Tinjauan tentang Materi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan,(7) Teori Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (8) Penelitian yang Relevan. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Bab III membahas Metode Penelitian. Dalam bagian dari sub bab ini antara lain; (1) Metode dan Desain Penelitian, (2) Populasi dan Sampel, (3) Defenisi Operasional, (4) Instrumen Penelitian, (5) Prosedur Penelitian, (6) Teknik pengumpulan dan Analisis Data. Bab IV membahas mengenai hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Deskripsi Lokasi Penelitian, (2) Hasil Penelitian dan (3) Pembahasan. Bab V membahas Simpulan dan Saran. Dalam babi ni terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Kesimpulan dan (2) Rekomendasi.

